



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2018-2023**

KATA PENGANT

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung memperhatikan aspek perubahan, keberlanjutan serta peningkatan program pembangunan bidang pendidikan.

Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stake-holders*) pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pendidikan sampai dengan saat ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kota Bandung pada periode 2018-2023.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kota Bandung dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Pendidikan Kota Bandung bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran bidang pendidikan Pemerintah Kota Bandung.

Bandung, 19 Maret 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG

Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196406291985031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Istilah dan Singkatan (<i>Glossary</i>)	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan	18
1.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung	22
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	22
2.2 Sumber Daya	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	46
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan....	49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	49
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Bandung.....	65
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional	79
3.4 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	90

3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bandung	96
BAB IV Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan		106
4.1	Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung	106
4.2	Tujuan dan Indikator Tujuan	109
4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	107
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan		117
Bab VI Rencana Program, dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif		120
Bab VII Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD		129
Bab VIII Penutup.....		132
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tujuan Pendidikan Nasional sesuai yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Karena itu pendidikan menempati salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam menghadapi perkembangan baik nasional maupun internasional yang demikian mengglobal dan semakin kompleks, maka menuntut tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan bidang yang harus mampu menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul.

Pada tingkat Nasional, program yang dilaksanakan tetap mengacu pada 4 program strategis, yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan efisiensi pendidikan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, program rintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan program strategis yang terus diupayakan penuntasannya secara nasional.

Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama kali mencanangkan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 90 tahun 2023, maka Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kebijakan di sektor pendidikan. Kebijakan tersebut antara lain mengenai upaya peningkatan (APS) Angka Partisipasi Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan (HLS) angka Rata-rata Lama Sekolah dalam rangka peningkatan (IP) Indeks Pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan kewajiban tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kewenangan daerah sebagai daerah otonom yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom. Dan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, telah ditetapkan pula Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Selaras dengan tuntutan perkembangan di masa mendatang, Pemerintah Kota Bandung telah mencanangkan rencana pembangunan jangka menengah yang tertuang pada Peraturan Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD tersebut ditegaskan bahwa visi pembangunan Kota Bandung yang akan dicapai adalah “*Terwujudnya Kota Bandung yang nyaman, unggul, sejahtera, dan agamis*”.

Visi pembangunan Kota Bandung tersebut dijabarkan ke dalam empat misi sebagai berikut: (1) Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing, (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani, (3) Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan, (4) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, (5) Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Pembangunan bidang pendidikan di Kota Bandung terus dilakukan dan merupakan salah satu program prioritas dari tujuh program prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bandung yang meliputi: (1) Bidang Pendidikan, (2) Bidang Kesehatan, (3) Bidang Kemakmuran, (4) Bidang Lingkungan Hidup, (5) Bidang Seni dan Budaya dan (6) Bidang Olahraga/prestasi, (7) Bidang Agama. Upaya meningkatkan SDM terus dikembangkan, di antaranya melalui Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu suatu upaya penanganan anak sejak dini pada masa *golden age*. Demikian juga pada setiap jenjang pendidikan, terus diupayakan pengembangan infrastruktur dan sarana pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan peningkatan kreativitas kegiatan siswa.

Kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung masih dihadapkan kepada berbagai masalah, baik berkenaan dengan masalah sarana dan prasarana, biaya pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, maupun mengenai pengelolaan pendidikan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumber Daya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial, dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir,

efektif, dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan menengah umum.

Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara *top-down planning* dan *bottom up planning* berbasis anggaran, terpadu dan terprogram.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan semua program dan kebijakan tersebut, maka disusun perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pendidikan dengan menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap IV Tahun 2018-2023, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan SKPD yang

memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan kondisi dan potensi daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Dinas Pendidikan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD

b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra

Rapat koordinasi ini diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan UPT Dinas Pendidikan Kota Bandung serta *stakeholder* lainnya, dengan materi rancangan awal Renstra.

c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi kemudian disusun Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

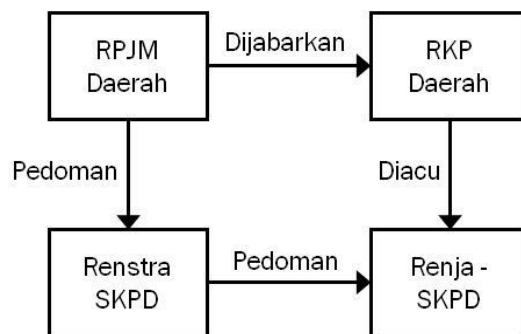
a. Hubungan Renstra dengan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.

b. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan (Renja-SKPD)

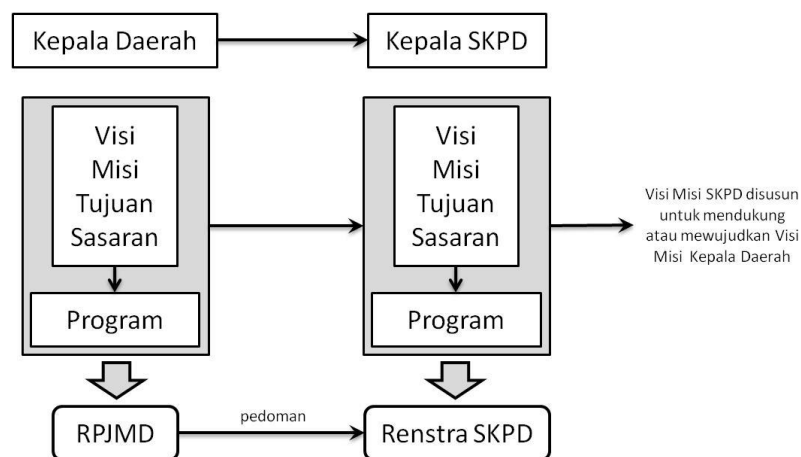
Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam dua gambar berikut ini.



Gambar 1.3. Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan

Kepala daerah memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk perencanaan pembangunan selama masa jabatannya. Visi, misi, tujuan dan sasaran kepala daerah ditangkap oleh kepala SKPD yang kemudian dituangkan menjadi Visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra. Dengan demikian visi misi SKPD disusun untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah. Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.4. Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No 10 Tahun 1989 tentang batas wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023 adalah untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi serta melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bandung.

b. Tujuan

1. Mengidentifikasi sejumlah permasalahan pendidikan di Kota Bandung yang diperkirakan menghambat pencapaian visi dan misi Dinas

Pendidikan Kota Bandung dalam mewujudkan program bermutu, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

2. Mendapatkan gambaran tentang kondisi, potensi dan ketersediaan sumber daya bidang pendidikan di Kota Bandung, sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada dan mengalokasikan sumber daya serta dana secara lebih efisien.
3. Menyusun sejumlah langkah aksi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
4. Membangun agenda dan langkah kerja yang sistematis guna mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis Pemerintah Kota Bandung ke dalam sejumlah langkah dan kegiatan yang lebih operasional dan implementatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, Landasan hukum, maksud, dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan

Memuat informasi tentang peran, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah: tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan

Bagian ini menyajikan informasi mengenai: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan: telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan bidang pendidikan di Kota Bandung.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam jangka menengah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program beserta indikator kinerja, pagu indikatif target.

BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian ini menyajikan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai berikut:

a. Tugas Pokok.

Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi.

b. Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas. maka Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Sekolah Dasar (PSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), dan Pendidikan Non

- Formal dan Informal (PNFI) serta Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelaksanaan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Sekolah Dasar (PSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Pembinaan dan pengembangan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Sekolah Dasar (PTKSD), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI);
 4. Pembinaan dan Pengembangan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu: Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal dan Informal (PNFI);

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

c. Struktur Organisasi.

Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Tipe A, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi,
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, yang membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat
 3. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan
- d. Bidang Pembinaan & Pengembangan Sekolah Dasar, yang membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum
 2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana

e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahkan:

1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
3. Seksi Sarana dan Prasarana

f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan, yang membawahkan:

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

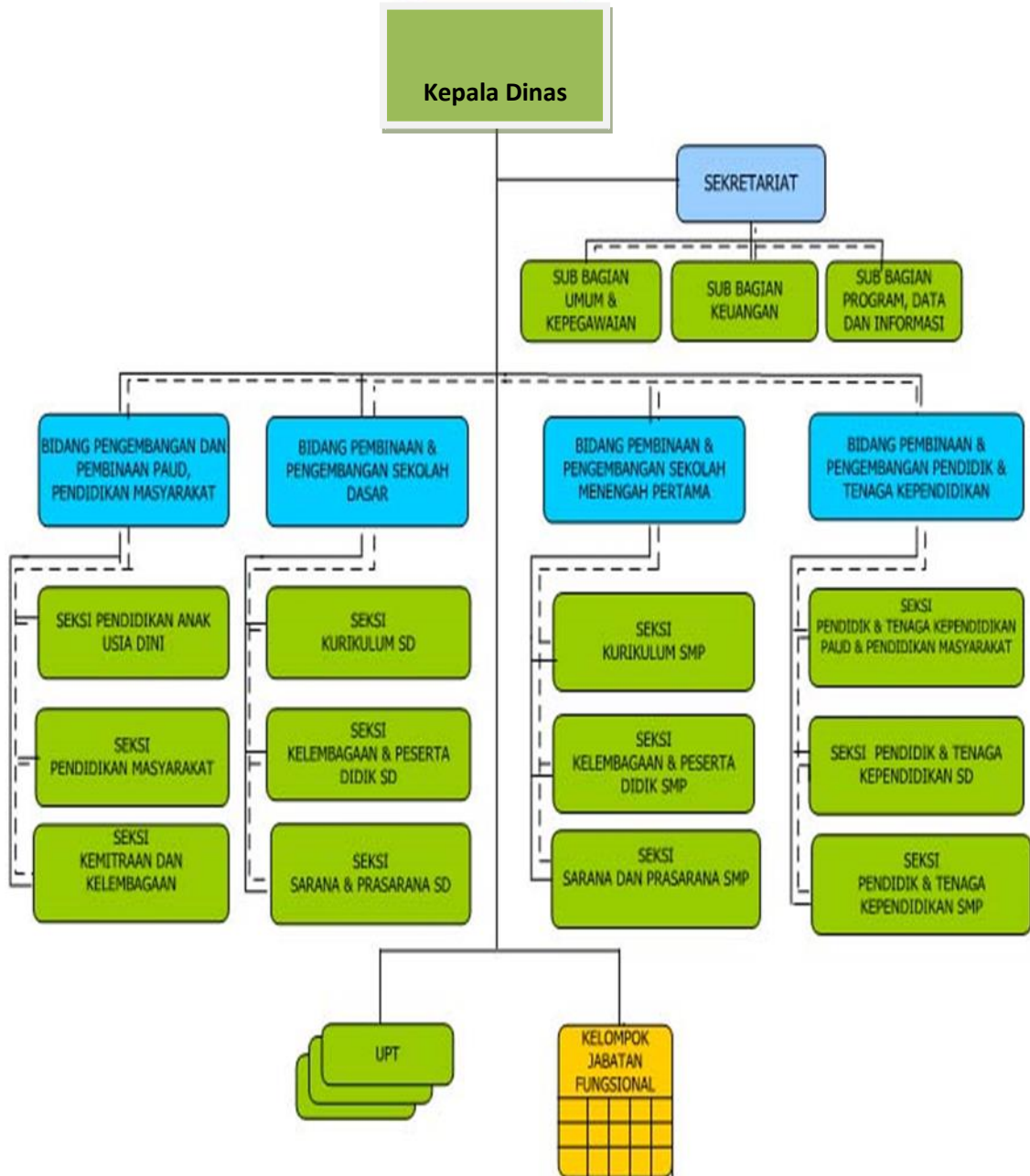
(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Berikut ini Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung:

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Bandung

a. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Bandung termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar sampai dengan Bulan Desember 2018 sebanyak: 409 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Asset, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program Data dan Informasi, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan serta 10 UPT PK-PNFI (Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal) dan 1 SKB.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Dinas Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Struktural	240 orang
2.	Pengawas TK	10 orang

3.	Pengawas SD	126 orang
4.	Pengawas SMP	57 orang
5.	Penilik	98 orang
6.	Pamong Belajar	23 orang
Jumlah		409 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebanyak 26.315 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 80% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	610	290	232	122	1249	33	-	2.536
2	SD	1.244	88	1.448	237	8.002	306	3	11.328
3	SLB	39	-	15	13	422	39	2	530
4	SMP	174	96	34	241	4.183	354	2	5.084
5	SMA	58	6	6	127	3.078	404	8	3.687
6	SMK	106	12	9	136	2.628	252	7	3.150
Total		2.231	492	1.744	876	19.562	1.388	22	26.315

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tabel: 2.4
Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status PNS dan NON PNS		Total
		PNS	NON PNS	
1	TK	429	2.107	2.536
2	SD	6.452	4.876	11.328
3	SLB	314	216	530
4	SMP	2.595	2.489	5.084
5	SMA	1.961	1.726	3.687

6	SMK	1.225	1.925	3.150
	Total	12.976	13.339	26.315

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018

b. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Tabel 2.5
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Ruang Kelas			
		Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sdg/Brnt
TK/TPA/KB/S PS	1.312	1.341	1.146	36	159
SD	815	5.600	5.137	420	43
MI	67	403	352	32	19
SMP	217	2.619	2.611	5	3
MTs	42	258	215	31	12
JUMLAH	2.785	13.269	12.260	692	317

Sumber: Dapodik Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama 5 tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2017.

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga Negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap

tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Terlebih lagi, dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018, penegasan akan pentingnya pendidikan juga bisa ditemukan dalam misi 3 tentang Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing telah menjadi arah bagi pembangunan di Kota Bandung. Angka Melek Huruf merupakan indikator makro yang hasil pengukurannya berdasarkan hasil pengukuran dari BPS Kota Bandung.

Indikator ini realisasi capaiannya melebihi target, yaitu dari target 99.67, terealisasi sebesar 99.69 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100.02%. Jika dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, capaian AMH pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0.04%. Berikut grafik perkembangan pencapaian AMH selama lima tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017:

Grafik 2.1:
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun 2010-2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017

Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun cenderung tidak terlalu besar, hal ini disebabkan karena capaian kinerja sudah mendekati 100%. Walaupun demikian, di tahun 2017 masih ada masyarakat Kota Bandung yang buta huruf (0,21%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan lain yang penting seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini merupakan indikator

makro yang hasil pengukurannya merupakan hasil dari pengukuran BPS Kota Bandung.

Pada tahun 2017, capaian kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan kinerja yang baik. Walaupun tidak tercapai sesuai target realisasi capaian indikator RLS ini mengalami kenaikan sebesar 0.5 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Capaian indikator ini juga menyumbang sebanyak 92.50% dari target pada akhir RPJMD pada Tahun 2018.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidak tercapaiannya RLS 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya.

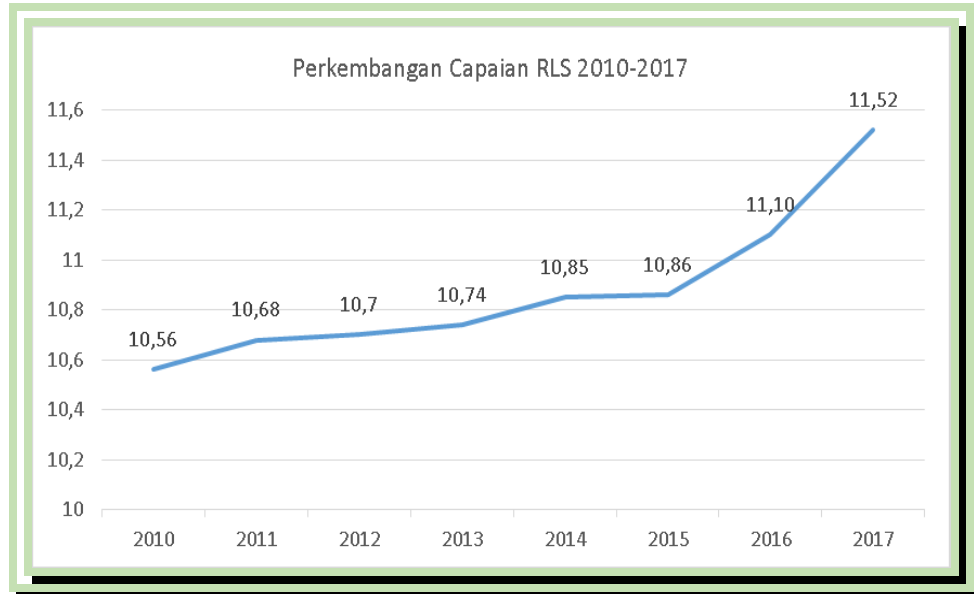
Intervensi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mendukung capaian Rata-rata Lama Sekolah antara lain penyelenggaraan ujian paket A setara SD, penyelenggaraan ujian paket B setara SMP dan penyelenggaraan ujian paket C setara SMA.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bandung, selama 2010-2014 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 11.05 tahun, di tahun 2016 menjadi 11.10 tahun pada tahun 2017 (setara SLTA kelas 2). Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kota Bandung ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Bandung semakin sadar akan pentingnya

pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berikut ini adalah perkembangan capaian RLS selama 8 tahun:

Grafik 2.2:
Perkembangan capaian RLS dari Tahun 2010-2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.6: Perkembangan APM Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Paket A	123,13%	123,13 %	123,13 %	123,13 %	123,13 %
2	SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS telah mencapai target 100% untuk Kota Bandung pada tahun 2013. Hanya saja, untuk

jenjang pendidikan SMA/MA/MK kondisi APM yang ada masih dibawah 100 % yaitu sebesar 90,59%. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari tingkat menengah ke tingkat atas.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bandung selama periode 2013-2017.

Tabel 2.7
Perkembangan APK Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	127,13	131,05	131,05	131,05	131,05
2	SMP/MTs	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16

Sumber: LKPJ AMJ Kota Bandung

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Selama periode 2013-2017, perkembangan APT tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Tabel 2.8:
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Kota Bandung Tahun 2013-2017
(Penduduk 10 Tahun ke Atas)

No	APT	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD / MI / Sederajat	22,3%	25,0%	23,7%	23,7%	n.a.
2	SLTP / MTs / Sederajat	20,6%	19,6%	20,1%	20,1%	n.a.

Sumber: BPS Kota Bandung dan LKPJ AMJ Kota Bandung (diolah)

Pendidikan merupakan asset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja di urusan pendidikan Kota Bandung.

Di tingkat pendidikan dasar, perkembangan rasio guru/murid di tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Bandung mengalami peningkatan selama periode 2013-2017. Jika pada tahun 2013 rasio guru/murid SD/MI ada di tingkat 47,2, maka pada tahun 2017 meningkat menjadi 48,3. Sedangkan untuk rasio guru/murid di tingkat SMP/MTs di tahun 2017 mencapai 64,2, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 61,6. Dari rasio tersebut diketahui bahwa kecukupan guru untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Bandung mengalami peningkatan, demikian juga rasio guru/murid di tingkat SMA/MA/SMK Kota Bandung.

Tabel 2.9
Hasil Kinerja Urusan Pendidikan
Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pendidikan						
1	Pendidikan dasar					
	- Rasio terhadap murid SD/MI	47,5	48,3	n.a	24	24
	- Rasio terhadap murid SMP/MTs	61,6	64,2	n.a	39	39
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,54%	99,55%	99,55%	99,62%	99,62%
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35%	45%	55%	65%	79.54%
4	Angka Putus Sekolah					
	- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%
	- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,06%	0,04%	0,02%	0,002%	0,002%
	-Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,30%	0,20%	0,10%	0,05%	0,05%
5	Angka Kelulusan					
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,98%	99,98%	99,98%	100%	100%
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	113,75%	113,38%	113,38%	113,38%	113,38%
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	102,16%	102,16 %	102,16 %	102,16 %	102,16 %
8	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85%	90%	90%	89%	89%

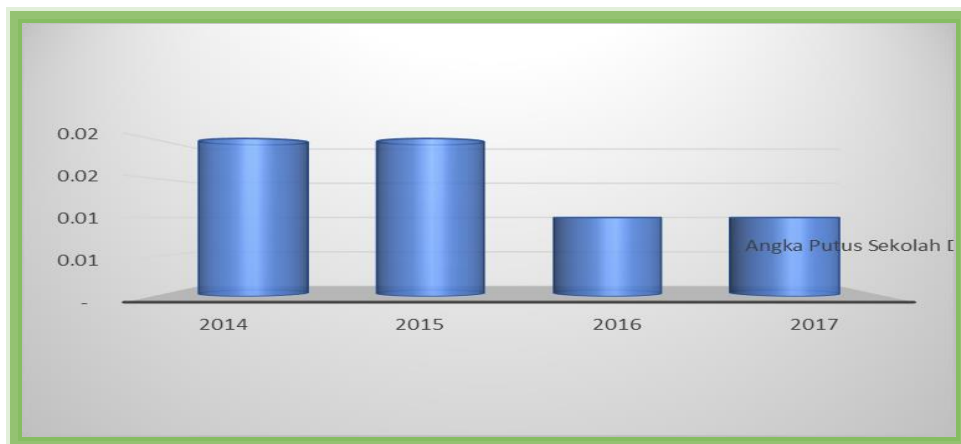
Sumber :BPS Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung.(diolah)

Angka putus sekolah SD, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0.01%, capaian indikator kinerja ini terealisasi sebesar 0.01% telah **sesuai target** dari target yang ditetapkan, dengan capaian kerjanya sebesar 100.00%, dan menunjukkan capaian kinerja yang **sangat baik**. Dibandingkan dengan capaian tahun 2016, indikator

ini capaian sama sebesar 0.01%. Indikator ini juga telah menyumbang terhadap capaian target RPJMD 2018 sebesar 100.00%.

Berikut grafik perkembangan angka putus sekolah SD selama 4 tahun:

Grafik 3.22: Angka Putus Sekolah SD



Masih adanya angka putus sekolah ini disebabkan oleh faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa SD yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua.

Kondisi siswa putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor. Pada lingkungan perkotaan angka putus sekolah dipicu oleh tingkat kemiskinan. Pada beberapa kasus anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki status kependudukan tetap mengalami kesulitan bagi anak-anaknya untuk memperoleh akses pendidikan formal. Hal ini mendorong munculnya anak-anak jalanan, pengemis dan gelandangan.

Untuk menurunkan angka putus sekolah pemerintah telah menyediakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi sekolah antara lain:

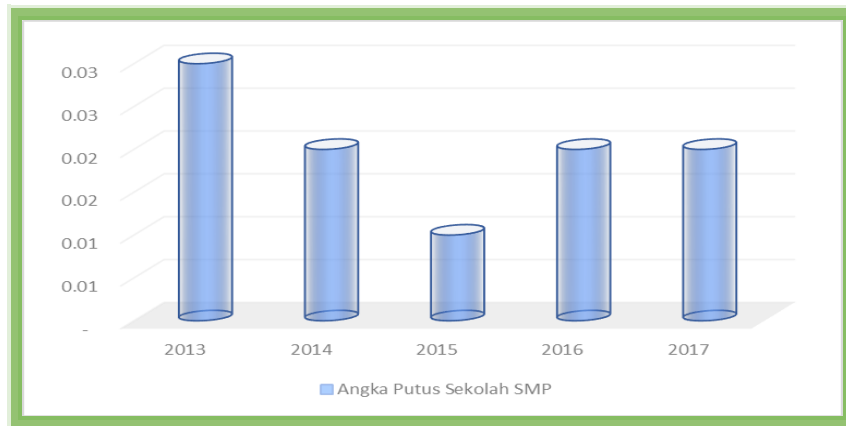
1. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Bantuan Siswa Miskin (BSM),
3. Program paket B dan program SMP terbuka dan program retrieval (program perekrutan kembali anak-anak yang putus sekolah), program ini dilaksanakan oleh UPT PK-PNFI Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dinas Pendidikan Kota Bandung juga melaksanakan program penyelenggaraan sekolah gratis bagi jenjang SD di Kota Bandung. Program sekolah gratis diperuntukan bagi 274 sekolah dasar negeri, dan 192 sekolah dasar swasta .

Angka Putus Sekolah SMP pada tahun 2017 capaian indikator kinerja ini telah **Sesuai target** sebesar 0.02% dari target yang ditetapkan sebesar 0.02%, dengan capaian kinerjanya sebesar 100.00%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian indicator ini pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0.01%. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100.00% dari target pada akhir RPJMD (2018).

Berikut grafik perkembangan capaian indikator angka putus sekolah SMP dari tahun 2013 sampai dengan 2017:

Grafik 3.23: Angka Putus Sekolah SMP



Siswa putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor. Pada lingkungan perkotaan angka putus sekolah dipicu oleh tingkat kemiskinan. Pada beberapa kasus anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki status kependudukan tetap mengalami kesulitan bagi anak-anaknya untuk memperoleh akses pendidikan formal. Hal ini mendorong munculnya anak-anak jalanan, pengemis dan gelandangan. Selain itu, angka putus sekolah pada jenjang ini didorong oleh budaya membantu ekonomi rumah tangga dengan bekerja menjadi buruh.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya angka putus sekolah, upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mendekatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

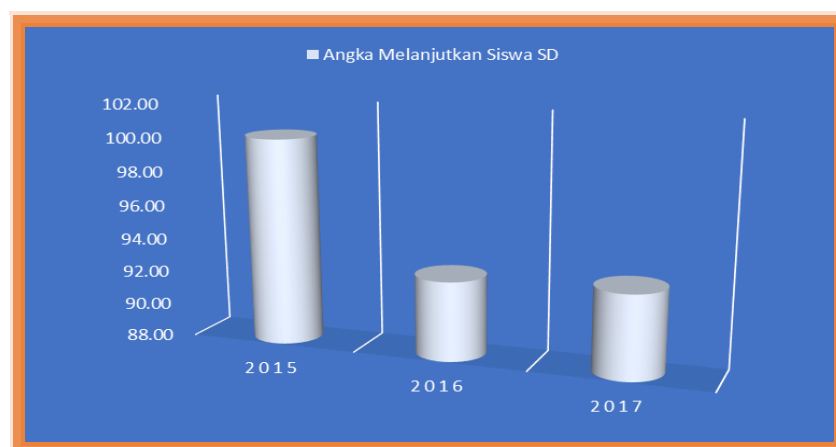
Masih tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa SMP yang tidak mau

menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua meskipun Pemerintah telah menyediakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi sekolah antara lain: Program Sekolah Gratis bagi 57 SMP Negeri, dan 188 SMP Swasta, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Beasiswa Siswa Miskin dan program paket B.

Angka melanjutkan SD, pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 92.95%. Capaian indikator kinerja tersebut telah melebihi target dari persentase yang ditargetkan sebesar 92.69%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100.22%, dan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 92.69%, capaian indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0.26%. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100.22% dari target pada akhir RPJMD (2018).

Berikut grafik perkembangan indicator angka melanjutkan siswa SD dari tahun 2015 sampai dengan 2017:

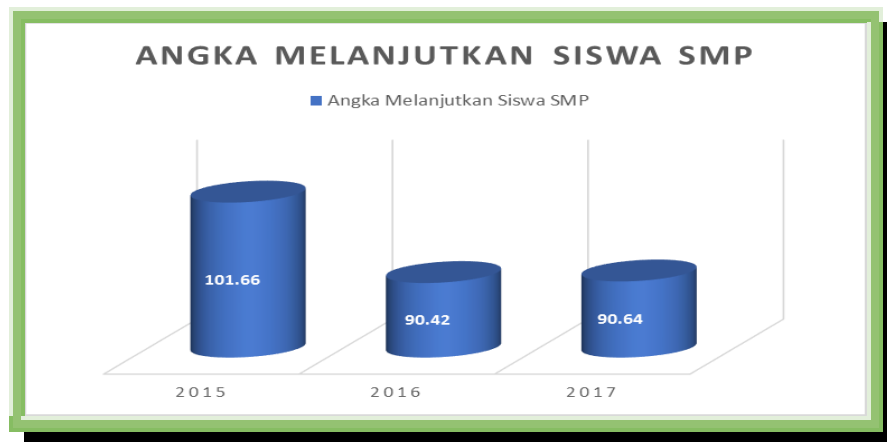
Grafik 3.31: Angka Meanjutkan Siswa SD



Kontribusi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mendukung capaian ini adalah di antaranya melalui pelaksanaan Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis.

Angka melanjutkan SMP, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 90.40%, indikator kinerja ini telah terealisasi melebihi target sebesar 94.64% dengan persentase capaian kinerja sebesar 104.69%, dan ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016, capaian indicator ini mengalami kenaikan sebesar 4.22%. Berikut grafik perkembangan capaian selama 3 tahun:

Grafik 3.32: Angka Melanjutkan Siswa SMP



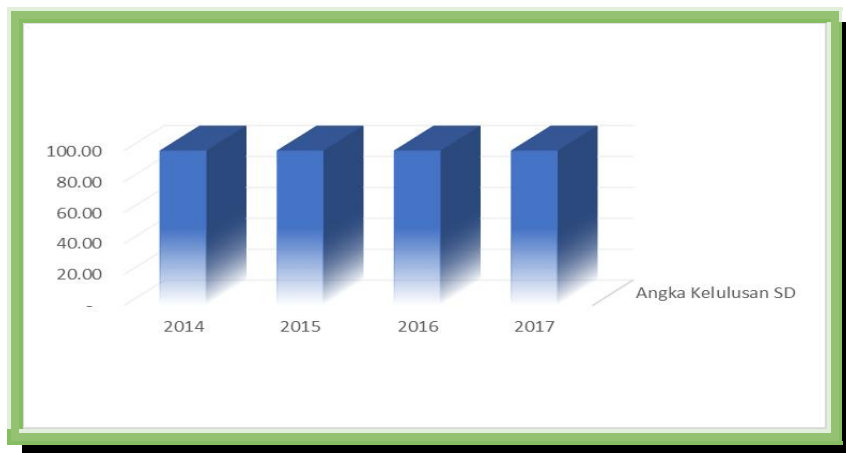
Kontribusi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mendukung capaian ini adalah di antaranya melalui pelaksanaan

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis.

Angka Kelulusan SD, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 100.00%, indikator kinerja ini telah terealisasi **sesuai target** sebesar 100.00% dengan persentase capaian sebesar 100.00%, dan menunjukkan capaian kinerja yang **baik**. Capaian indikator ini sama besarnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 yaitu sebesar 100.00% Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100.00% dari target pada akhir RPJMD (2018).

Berikut grafik capaian indikator angka kelulusan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017:

Grafik 3.28: Angka Kelulusan SD

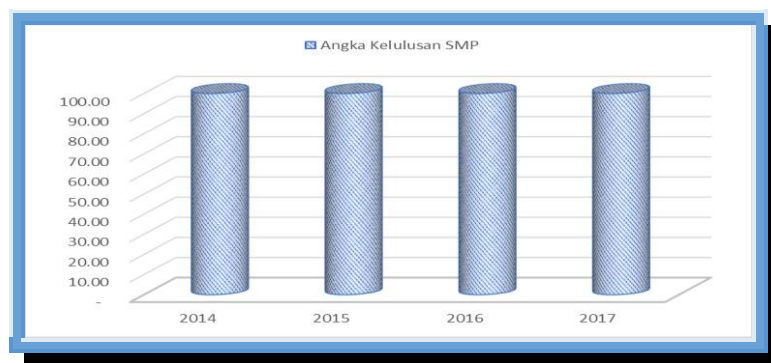


Angka kelulusan SMP, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 100.00%, indikator kinerja ini telah terealisasi **sesuai target** sebesar 100.00% dengan

persentase capaian sebesar 100.00%, dan menunjukkan capaian kinerja yang **baik**. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, capaian indikator ini besarnya sama yaitu sebesar 100.00%

Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100.00% dari target pada akhir RPJMD Tahun 2018. Berikut grafik capaian indikator ini dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017:

Grafik 3.29: Angka Kelulusan SMP



Dalam aspek kualitas pengajar, tingkat guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Bandung selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2013 baru mencapai 85% guru yang memenuhi kualifikasi ini, maka pada tahun 2017 sudah mencapai 90%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2013 menjadi 89%, ini disebabkan adanya penambahan jumlah guru honorer di berbagai jenjang pendidikan.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD

dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10: Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 2013-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	APK SD/MI (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung)				131.05%	131.05%	131.05%	131.05%	131.05%	127.13%	131.05%	131.05%	131.05%	131.05%	97.01%	100%	100%	100%	100%
2	APK SD/MI (khusus Kota Bandung)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	APM SD/MI (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung)				123.13%	123.13%	123.13%	123.13%	123.13%	122.99%	123.13%	123.13%	123.13%	123.13%	98.89%	100%	100%	100%	100%
4	APM SD/MI (khusus Kota Bandung)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	APK SMP/MTs (termasuk didalamnya siswa dari luar Kota Bandung)				116.16%	116.16%	116.16%	116.16%	116.16%	116.16%	116.16%	116.16%	116.16%	116.16%	100%	100%	100%	100%	100%
6	APK SMP/MTs (khusus Kota Bandung)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	APM SMP/MTs				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	APM SMP/MTs (khusus Kota Bandung)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Angka Putus Sekolah SD/MI	<1%			0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs				0.08%	0.06%	0.04%	0.02%	0.02%	0.08%	0.06%	0.04%	0.02%	0.02%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Rehabilitasi total SD/MI				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rehabilitasi total SMP/MTs				17	26	17	20	30	17	26	17	20	30	100%	100%	100%	100%	100%
13	Rehabilitasi berat SD/MI				268	200	80	60	60	268	200	80	60	60	100%	100%	100%	100%	100%
14	Rehabilitasi berat SMP/MTs				29	40	40	40	40	29	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
15	Rehabilitasi sedang SD/MI				241	0	60	60	60	241	0	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%
16	Rehabilitasi sedang SMP/MTs				28	20	40	40	40	28	20	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%
17	Rehabilitasi ringan SD/MI				357	0	0	0	0	357	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
18	Rehabilitasi ringan SMP/MTs				93	20	0	0	0	93	20	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
19	Pembangunan ruang kelas baru SD/MI				55	14	50	50	50	55	14	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%
20	Pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs				20	10	20	20	20	20	10	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
21	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI				30%	40%	50%	65%	80%	30%	40%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs				55%	60%	70%	80%	90%	55%	60%	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Sekolah gratis SD/MI				94.13 %	95 %	95 %	95%	95%	94.13 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	100%	100%	100%	100%
24	Sekolah gratis SMP/MTs				94.13 %	95 %	95 %	95%	95%	94.13 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	100%	100%	100%	100%
25	Beasiswa bagi keluarga tidak mampu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	APK SMA/MA/SMK (khusus Kota Bandung)				100%	100%	100%	98.92%	98.96%	98.80%	98.84%	98.88%	98.88%	98.88%	88.13%	87.49%	89.22%	100%	100%
27	APM SMA/MA/SMK (khusus Kota Bandung)				91.90%	95.90%	96.16%	88.19%	90.59%	80.99%	83.39%	85.79%	85.79%	85.79%	88.13%	87.49%	89.22%	100%	100%
28	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK				0.40%	0.30%	0.20%	0.10%	0.05%	0.40%	0.30%	0.20%	0.20%	0.20%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
29	Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif				25%	35%	45%	55%	65%	25%	35%	45%	45%	45%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia industri				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Rehabilitasi total SMA/SMK/MA				2	0	0	-	-	2	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
32	Rehabilitasi berat SMA/SMK/MA				6	0	0	10	10	6	12	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
33	Rehabilitasi sedang SMA/SMK/MA				18	0	0	5	5	18	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
34	Rehabilitasi ringan SMA/SMK/MA				74	150	0	-	-	74	150	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
35	Pembangunan ruang kelas baru SMA/SMK/MA				18	20	20	15	15	51	5	5	15	15	283.33%	25%	25%	100%	100%
36	Pembangunan unit sekolah baru (SMP/SMA/SMK Negeri)				1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%	100%
37	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK				70%	75%	80%	85%	95%	70%	75%	80%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
38	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD				25%	35%	45%	55%	65%	25%	35%	45%	35%	45%	100%	100%	100%	100%	100%
39	Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal (Kejar Paket A, B dan C)				25%	35%	45%	55%	65%	25%	35%	45%	35%	45%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Manajemen pelayanan pendidikan				88%	91%	94%	96%	98%	88%	91%	94%	91%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Peningkatan kualitas penyelenggaraan UAN/UAS				87%	90%	92%	94%	99%	87%	90%	92%	90%	92%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Tingkat kelulusan SD/MI				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Tingkat kelulusan SMP/MTs				99.97%	99.98%	99.99%	100.00%	100.00%	99.97%	99.98%	99.99%	99.98%	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%
44	Tingkat kelulusan SMA/MA/SMK				99.2%	99.4%	99.6%	99.70%	99.80%	99.2%	99.4%	99.6%	99.4%	99.6%	100%	100%	100%	100%	100%
45	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB)				90%	92%	94%	96%	99%	90%	92%	94%	92%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
46	Merger dan regrouping SD Negeri				600	550	500	400	300	600	550	500	400	300	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
47	Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan				25%	50%	75%	80%	100%	25%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
48	Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik				25%	50%	75%	80%	100%	25%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.11: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung 2013-2017

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.069.693.775	2.188.585.453	3.004.595.557	2.914.384.599	5,917,989,800	7.348.552.020	1.916.181.933	2.786.739.288	996.365.683	4,836,234,736	31.85	87.55	92.75	34.19	81.72	20%	10%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.147.250.000	840.000.000	1.222.849.983	1.028.487.000	1,010,813,200	2.476.588.700	811.761.600	1.146.967.196	819.325.942	701,386,494.00	78.69	96.64	93.79	79.66	69.39	20%	2,08%
Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	77.500.000	38.500.000	54.500.000	80.500.000	125,000,000	55.000.000	31.766.600	54.500.000	80.231.600	125,000,000	70.97	82.51	100.00	99.67	100.00	20%	18%
Program Peningkatan	1.150.000.000	211.000.000	285.000.000	633.350.000	652,250,000	823.973.055	177.562.400	203.357.000	548.409.325	477,095,750	71.65	84.15	71.35	86.59	73.15	20%	15%

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	400.000.000	282.500.000	54.000.000	209.800.000	422,520,000	79.730.000	164.999.050	53.227.500	197.265.000	398,480,000	19.93	58.41	98.57	94.11	94.31	20%	13%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	905.750.000	507.617.000	700.000.000	1.300.000.000	1,830,000,000	854.090.100	492.614.300	681.388.500	1.275.743.850	1,727,227,330	95.70	97.04	97.34	98.13	94.38	20%	19%
Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	109.840.778.676	56.986.889.000	94.212.797.305	99.744.612.916	115,425,188,269	99.959.063.856	14.137.204.915	78.527.577.867	85.741.154.092	106,338,622,944	91.00	24.81	83.35	85.96	92.13	20%	16%
Pendidikan Menengah	24.708.510.000	13.010.869.576	6.306.905.997	43.706.184.768	48,752,565,717	16.231.100.308	7.559.638.772	3.894.002.650	26.751.260.066	32,153,605,170	65.69	58.10	61.74	61.21	65.95	20%	13%
Pendidikan Non Formal	861.750.000	394.519.000	1.617.800.000	3.984.950.000	3,268,061,000	774.758.700	389.595.400	1.396.929.125	3.549.863.320	2,935,463,120	89.91	98.75	86.35	89.08	89.82	20%	18%
Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.380.200.000	2.687.360.000	344.696.000	2.283.190.000	1,902,400,000	2.295.995.350	2.586.705.000	320.474.598	2.212.259.150	1,809,955,360	96.46	96.25	92.97	96.89	95.14	20%	19%

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
n																	
Manajemen pelayanan Pendidikan	1.019.941.324	722.884.000	575.900.000	2.304.585.000	1.792.650.000	174.955.600	432.514.405	377.168.050	1.562.601.600	1.516.565.870	17.15	59.83	65.49	67.80	84.60	20%	13%
Revitalisasi Infrastruktur Sarana Penyelenggaraan PORDA	15.012.101.097	14.381.969.097	0	0	0	0	12.239.360.811	0	0	0	0.00	85.10	0	0.00	0.00	20%	8%
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis	0	0	72.025.645.000	80.014.438.971	0	0	0	67.498.812.936	79.197.854.380	0	0	0	93.71	98.98	0.00	20%	19%
Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN	0	0	115.524.425.000	0	0	0	0	115.278.225.000	0	0	0	0	99.79	0.00	0.00	20%	20%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan- tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasara-sasaran *Sustainable Development Goals (SDGs), Education For All (EFA)* dan *Education for Sustainable Development (EfSD)*;
- 2) Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan, terpencil, dan rawan bencana;
- 3) Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;
- 4) Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga;
- 5) Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;

- 6) Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar gender dan antar wilayah;
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
- 8) Memperbaiki dan meningkatkan Kredibilitas PPDB;
- 9) Menghasilkan Sumber Daya Manusia kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- 10) Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi;
- 11) Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 12) Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan;
- 13) Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional;
- 14) Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;
- 15) Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan sekolah berdaya saing global;

- 16) Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

- 1) Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat.
- 2) Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi Urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Pangsa Pasar Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri menuntut Persyaratan Pendidikan lebih tinggi dan terampil.
- 4) Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada di luar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Menyikapi hal demikian analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan aturan/kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan. Oleh karena itu dalam menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)*.

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung yang

mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang di dalamnya mencakup (1) sumber daya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a) Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Bandung secara berkesinambungan, efektif-efisien dan bersinergi menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur, dan terkendali. Hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya prestasi kejuaraan baik dalam penguasaan materi akademis maupun nonakademis seperti prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional.
- b) Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kota Bandung untuk mendukung dan memantapkan program Bandung Cerdas yang dirumuskan dalam Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung guna mendukung Kota Bandung sebagai Kota Bermartabat 2025 dengan Misi menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan pendidikan yang

unggul dan bermutu, meningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan profesionalisme dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan Pendidikan Karakter menuju *good governance* melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

- c) Tersedianya sumberdaya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan.
- d) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia Global, hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, jaringan internet (LAN) dan yang lainnya serta didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil.
- e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Siap

melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

2. Kelemahan

Dalam penyelenggaraan bidang Pendidikan juga tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan. Dalam kehidupan sosial masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi Ekonomi yang mengakibatkan banyaknya anak rawan dan putus sekolah, faktor budaya yang sangat kental mempengaruhi perilaku anak di samping masih terdapat anak-anak yang masuk usia sekolah tapi enggan untuk bersekolah.

Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar. Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Di lain pihak kemampuan tenaga kependidikan untuk mengembang

tugasnya secara profesional melalui pelatihan-pelatihan masih perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan di dalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metoda pembelajaran dan murid. Permasalahan pendidikan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam upaya mencapai IPM 80 adalah:

a) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan

Akses dan pemerataan pendidikan adalah:

- 1) Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah;
- 2) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
- 3) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
- 4) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di masyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;
- 5) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

b) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah:

- 1) Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah;
- 2) Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;
- 3) Belum meratanya disiplin guru dalam melaksanakan tugas;
- 4) inovasi dalam perencanaan kurikulum belum merata pada semua sekolah, dan sekolah level bawah cenderung ketidaksiapannya semakin tinggi, sekolah mempersiapkan pelaksanaan BBE/*Life Skills* sebagai pendekatan tereduksi pada lingkup vokasional;
- 5) media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
- 6) internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;

- 7) kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai media belajar masih lemah;
- 8) Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram;
- 9) kolaborasi dalam pembaruan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;
- 10) belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;
- 11) belum ditetapkan standar mutu yang menjadi indikator pencapaian program;
- 12) belum terdapat kebijakan untuk menetapkan kendali mutu yang merupakan rencana implementasi kebijakan tingkat nasional;

c) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- 1) kurangnya sekolah dalam memfasilitasi siswa yang berprestasi;

- 2) Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal;
- 3) Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
- 4) Lulusan sekolah kurang memiliki ketrampilan dan kecakapan hidup;
- 5) mengacu kepada kebutuhan pasar;
- 6) Belum Optimalnya kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- 7) Belum mampu menjanjikan nilai jual lulusan.

d) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan

Efisiensi pendidikan adalah:

- 1) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
- 2) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
- 3) Mutu Pelayanan Administratif bidang kurikulum, sarana pendidikan dan bidang pengembangan profesi belum optimum;

- 4) Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah.
- 5) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena:
 - (1) Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
 - (2) Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan;
 - (3) Belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer;
 - (4) Kurangnya dukungan dana operasional dan alat transportasi untuk pendataan:
 - (a) sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategik dan program tahunan pada tingkat kota maupun tingkat sekolah belum berkembang baik;
 - (b) proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;

- (c) sekolah kurang dapat berfungsi optimal sebagai wahana belajar yang terencana;
- (d) sistem evaluasi dapat berfungsi sebagai bahan perbaikan belajar-mengajar dan manajemen pelaporan untuk pengembangan data pada tingkat sekolah masih sangat lemah;
- (e) permasalahan dalam bidang manajemen pendidikan adalah, tidak jelasnya konsep otonomi daerah di bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, masih tingginya peran pemerintah pusat dalam masalah-masalah teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- (f) masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel yang bisa dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan;
- (g) dana-dana pusat (APBN) untuk pengelolaan pendidikan dan pengalokasian seharusnya diberikan sepenuhnya kepada daerah itu sendiri agar pemanfaatannya akan lebih efisien dan

efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah;

- (h) verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah belum melibatkan seluruh stake holders sekolah secara transparan, serta belum optimumnya dalam pengelolaan administrasi keuangan sekolah, lebih ditingkatkan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dana yang berasal dari masyarakat;
- (i) pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu terpantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara efektif;
- (j) belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;
- (k) standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar lembaga kedinasan yang ikut mempengaruhi dan mewarnai terhadap kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Bandung. Dalam hal ini faktor-faktor luar termaksud adalah situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi.

1. Peluang

- a) Media masa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional, maupun nasional banyak terdapat di Kota Bandung, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b) Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi merupakan tujuan bagi orang-orang dari luar kota untuk menuntut ilmu karena memiliki perguruan tinggi favorit, sekolah-sekolah, dan pesantren. Selain itu Kota Bandung juga sebagai sentral pendidikan yang memiliki banyak lembaga penelitian juga pengembangan yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, potensi ini perlu

dimanfaatkan secara optimal oleh jajaran pendidikan di Kota Bandung untuk bersama-sama membangun SDM yang cerdas, terampil dan trengginas, sehat Jasmani dan Rohani, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki keunggulan kompetitif baik di tingkat nasional maupun di internasional.

- c) Besarnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (*stakeholders*) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang fasilitasi melalui implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS), Badan Akreditasi Sekolah (BAS), *Board Based Education* (BBE) *and Life skill*, Pendidikan Inklusif serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), Dewan Pendidikan (DP), dan Komite Sekolah.
- d) Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, mempunyai Luas wilayah 16.729,65 Ha. Luas tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Batas wilayah Kota Bandung adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Iklm asli kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya, namun pada beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan suhu, hal ini disebabkan polusi dan meningkatnya suhu global di antaranya efek rumah kaca.

2. Tantangan

- a) Kota Bandung sebagai tempat tujuan untuk mencari ilmu dan investasi telah mengundang banyak orang untuk bermigrasi yang berakibat terhadap tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM),

hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kota Bandung guna menuntaskan program-program pendidikan.

- b) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negatif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Bandung , hal ini menuntut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak.
- c) Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang, mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Bandung tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif di Kota Bandung karena terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya.

Melihat kekuatan maupun kelemahan yang ada, secara faktual Kota Bandung memiliki peluang untuk dapat berkembang sebagai Kota Pendidikan yang dapat memberikan layanan tidak hanya terhadap masyarakat kota namun dapat terus diperluas kepada masyarakat di sekeliling Kota Bandung, bahkan untuk masyarakat di manapun yang mendambakan pelayanan pendidikan yang baik. Dengan ditangani secara sinergi dalam sistem pengembangan pada bidang-bidang lainnya di Kota Bandung, bidang pendidikan dapat membuka peluang kerja yang luas, serta secara tidak langsung bersentuhan dengan dinamisasi kegiatan ekonomi masyarakat luas.

Analisis berikutnya diarahkan pada bentuk-bentuk ancaman. Ancaman potensial yang dapat menjadi penghambat pengembangan bidang pendidikan adalah kelemahan dalam mengelola potensi yang ada sekarang sehingga dapat menyebabkan kualitas layanan bidang pendidikan tidak dapat berkembang. Penyelenggaraan sekolah yang tidak efektif dapat berdampak negatif pada berbagai tatanan kehidupan. Ketidakefektifan itu dapat menyebabkan pencapaian target kurikulum rendah, pengetahuan siswa terbatas, pengembangan kemampuan profesional tenaga kependidikan tidak sesuai dengan harapan layanan masyarakat yang kritis, tawuran pelajar dan lain-lain, yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya mutu penampilan siswa sehingga tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung

Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 "TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS".

Kota Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis diartikan sebagai kota yang mempunyai harga diri yang dapat dibanggakan oleh seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa bermartabat sebagai pusat pertumbuhan, khususnya sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya dan nasional pada umumnya serta terlaksananya kehidupan beragama.

Kota Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis memiliki dimensi:

- a. Pemenuhan kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, bersih, indah, hijau dan berbunga.
- b. Pemenuhan kondisi lingkungan kegiatan ekonomi dan sosial sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya.

- c. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk.
- d. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis.
- e. Pemenuhan wujud pembinaan umat beragama.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandung : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur.

Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang merupakan manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap, dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Visi Kota Bandung 2018-2023 merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 2025. Kriteria capaian Visi

Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya *bertakwa* pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta kota yang teraman, mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan misi guna mencapai visi itu, sehingga diharapkan agar seluruh anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi lebih baik serta mendorong keberhasilannya.

Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023:

- 1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing**

- 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani**
- 3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan**
- 4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**
- 5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Pencapaian misi 1 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 1 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing adalah membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :

1. Meningkatnya Ketenteraman, Kerukunan dan Kenyamanan Hidup Masyarakat.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ketenteraman,

kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat Kota Bandung adalah Indeks Modal Sosial.

2. Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya pendidikan yang berkualitas di Kota Bandung adalah Harapan Lama Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD dan Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP.

3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

Pencapaian misi 2 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 2 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani adalah terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 2 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota, Nilai LPPD Kota, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Level Kematangan Smart City Kota Bandung.

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

Pencapaian misi 3 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 3 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Bandung.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 3 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :

1. Meningkatnya Perekonomian Kota

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perekonomian kota adalah PDRB perkapita dan Indeks Pariwisata.

2. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatkan kesempatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka.

3. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunnya jumlah penduduk miskin adalah angka kemiskinan.

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pencapaian misi 4 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 4 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur Kota Bandung

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 4 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :

1. Meningkatnya ruang kota yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ruang kota yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan adalah Persentase RTH

2. Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas adalah Persentase Luas Genangan yang tertangani, Titik kemacetan yang tertangani, dan Persentase luasan kawasan kumuh.

3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota

Bandung

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung adalah Indeks kualitas lingkungan hidup dan Cakupan layanan pengelolaan sampah kota.

4. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota melalui pembiayaan inovatif dan terintegrasi dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat.

Pencapaian misi 5 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 5 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi adalah optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan, yang dapat dilihat atau diukur dari indikator kinerja tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 5 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :

1. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan

2. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan adalah persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari CSR dan presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai dari swasta (KPBU, PINA, hibah, dll)

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kemdikbud

mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna).

Cita-cita Kemdikbud dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2015-2019) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemdikbud 2014 adalah : **"Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas dan Beradab"** Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan yang:

- a) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
- b) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;

- c) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- d) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender dan sebagainya;
- e) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
- f) melestarikan dan memperkuat kebudayaan Indonesia.

Untuk mencapai visi Kemdikbud 2019, Misi Kemdikbud 2015-2019 dikemas dalam Misi sebagai berikut.

- B. Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
- C. Memperluas **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan
- D. Meningkatkan **Kualitas** Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
- E. Mewujudkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
- F. Menjamin **Kepastian** Memperoleh Layanan Pendidikan
- G. Mewujudkan dan Memperkuat Kebudayaan Indonesia

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kemdikbud serta mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 20019. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap

konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2015-2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran strategis akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan nasional. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019. Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan Visi Pendidikan Nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- 3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
- 5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi merupakan upaya yang sistematis melalui pengintegrasian dari tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai

misi Depdiknas yang telah ditetapkan. Keenam strategi pembangunan pendidikan nasional pada periode lima tahun mendatang adalah :

1. Perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan kesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota melalui:
 - a. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang bermutu yang merata antar provinsi, kabupaten dan kota.
 - b. Perluasan dan pemerataan akses TK/TKLB bermutu dan kesetaraan gender disemua propinsi, kabupaten dan kota.
 - c. Keluasan dan pemerataan akses PAUD nonformal bermutu dan kesetaraan gender di semua propinsi, kabupaten dan kota.
 - d. Ketersediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD.

Masa usia dini merupakan periode emas (*golden-age*) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah masa yang paling berharga dan sangat penting bagi anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulan terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya yang dapat diperoleh melalui pendidikan usia dini (PAUD) yang meliputi TK/RA untuk anak usia 5-6 tahun, serta kelompok bermain, taman penitipan anak dan berbagai program serupa untuk anak usia 3-4 tahun. Selain itu beberapa muatan penyiapan anak usia dini untuk belajar

di SD/MI diberikan juga di Posyandu dan program Bina Balita. Posyandu yang pada awalnya merupakan program layanan kesehatan bagi ibu dan anak usia dini, kini telah dilengkapi muatan pendidikan. Demikian juga Bina Balita yang memberikan layanan pendidikan pemeliharaan kesehatan pada anak bagi orang tua, terutama ibu, yang memiliki anak di bawah usia 5 tahun. Kemungkinan tercapainya program ini sangat mungkin sekali karena ibu-ibu sekarang sebagian besar sudah menyadari betapa pentingnya pendidikan. Akan tetapi bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau di daerah pesisir belum tahu akan hal itu. Program ini akan tercapai sasarannya bila pihak yang berwenang secara langsung memberi penyuluhan betapa pentingnya pendidikan anak di usia dini.

A. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar universal bermutu dan kesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota melalui:

- a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar yang bermutu antar propinsi, kabupaten dan kota yang meliputi penyediaan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB.
- b. perluasan pemerataan akses SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu dan kesetaraan gender di semua propinsi, kabupaten dan kota.
- c. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A dan Paket B bermutu dan kesetaraan gender di semua propinsi, kabupaten dan kota.

d. penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar.

B. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan menengah bermutu, kesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua propinsi, kabupaten dan kota melalui:

- a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan menengah bermutu yang meliputi penyediaan tenaga kependidikan paket C.
- b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten dan kota.
- c. ketersediaan model kurikulum dan pembelajaran data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan kesetaraan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan kesetaraan menengah.

Departemen Pendidikan Nasional memiliki Kebijakan peningkatan rasio jumlah peserta didik SMK:SMA dari 30:70 menjadi 67:33 yang tertuang dalam rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019. Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha

dan industri. Pendidikan vokasi dirasa perlu karena memiliki paradigma yang menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*) guna mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Ketersambungan (*link*) diantara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggaradan kecocokan (*match*) setara *employee* dan *employer* menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan vokasi. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dan tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan yang dipilih dan ditekuninya. Pendidikan vokasi melayani sistem ekonomi, sistem sosial dan politik serta menjadi jawaban/terobosan pembangunan ekonomj kreatif. Pemerintah menghendaki rasio SMK : SMA adalah 67 : 33 adalah strategi yang tepat karena dilihat dari kesiapannya lulusan SMK lebih siap kerja dibanding lulusan SMA, akan tetapi apabila lulusan SMK tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi mereka akan hanya menjadi tenaga/karyawan dan bukan pemikir. Untuk itu perguruan tingga sebaiknya juga memfasilitasi para lulusan tersebut sehingga mereka menjadi tenaga pemikir.

- C. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi, bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara dilaksanakan melalui:
 - a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, kesetaraan gender dan relevan dengan

kebutuhan bangsa dan negara yang meliputi pemerataan dan perluasan akses program studi vokasi, profesi dan akademik.

- b. Ketersediaan data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi. Strategi ini bisa berhasil lebih baik apabila para dosen memiliki kualitas yang baik, perguruan tinggi dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta memberi kemudahan-kemudahan mahasiswa untuk maju. Adapun hambatan-hambatan yang mungkin muncul yaitu karena biaya perguruan tinggi semakin tinggi, semakin banyak lulusan yang tidak meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Sebaiknya pemerintah memberi kebijakan bagaimana agar keduanya bisa berjalan dengan memberikan subsidi misalnya.

D. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota;
- b. Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;

- c. Penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar nasional pendidikan orang dewasa berkelanjutan serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan orang dewasa berkelanjutan;

Strategi bisa terlaksana apabila masyarakat sampai lingkungan terkecil/RT diadakan kegiatan bebas buta huruf yang lebih dikenal dengan gerakan Bebas Tiga Buta. Kendala yang mungkin timbul yaitu sulitnya menggugah kesadaran para orang dewasa untuk belajar membaca dan menulis, sedangkan negara bisa maju apabila masyarakatnya tidak bodoh. Negara –negara yang sudah maju dulunya menempatkan pendidikan pada prioritas pendidikan pertama untuk memberantas pendidikan karena kemiskinan identik dengan kebodohan.

E. Penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan internal yang dilakukan melalui :

- a. Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Departemen Pendidikan Nasional yang meliputi perwujudan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama luar negeri Departemen Pendidikan Nasional.

- c. Penyediaan dan pendayagunaan buku ajar, kebahasaan, e-pendidikan, kehumasan dan sistem sekolah sehat meliputi perwujudan layanan prima di bidang informasi dan kehumasan pendidikan.
- d. Penguatan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Departemen Pendidikan Nasional yang meliputi pencapaian intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan yang akuntabel, pencapaian audit investigasi sesuai dengan standar audit dan perwujudan pelayanan prima dalam manajemen operasional Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018, ditetapkanlah visi pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : "Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk SDM yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis budaya Jawa Barat"

Hal-hal menyangkut pengertian, ruang lingkup atau batasan dari setiap pernyataan dalam visi tersebut agar menuju pada satu penafsiran/ atau persepsi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan maju adalah pendidikan yang berorientasi jauh ke masa depan (futuristik), peka dan tanggap terhadap setiap perubahan situasi atau dinamika politik, hukum, sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi; dan secara optimal menerapkan sistem tatakelola (manajemen) modern dengan memanfaatkan teknologi informasi, teknologi komunikasi yang mutakhir.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang "berkarakter" adalah SDM yang memiliki komitmen tinggi dengan dirinya yang dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan, keimanan, kebangsaan, atau nasionalisme serta budaya dalam kehidupan nyata (realitas hidup), menuju kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa yang lebih bermartabat dalam tatanan dan pergaulan masyarakat dunia atau global.
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM) yang "cerdas" adalah SDM yang memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis serta memecahkan permasalahan-permasalahan dalam realitas kehidupan yang nyata, serta mampu memberikan solusi yang optimal dan tuntas dari permasalahan

yang dipecahkan tersebut secara efektif dan efisien, logis atau rasional dan sistematis.

- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) yang "mandiri" adalah SDM yang memiliki keyakinan terhadap kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan diri dalam mengambil setiap keputusan dan melakukan setiap tindakan secara efektif dan efisien menuju kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa yang lebih baik dengan tidak bergantung kepada pihak lain.
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) yang "menguasai IPTEK" adalah SDM yang memiliki kapasitas, kemauan, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan untuk membiasakan secara terus menerus mengembangkan diri terhadap kegiatan riset atau penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna membangun kepercayaan diri yang tinggi untuk mampu bersaing dan unggul dalam kancah pergaulan dan tantangan masyarakat dunia atau global.
- 6) Sumber Daya Manusia (SDM) yang "berbasis budaya Jawa Barat" adalah SDM yang memiliki kapasitas, penghormatan, rasa cinta dan memiliki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal Jawa Barat, sebagai landasan berfikir dan bertindak di dalam merumuskan ide, gagasan dan konsep pendidikan berbudaya yang integral dan utuh, serta mampu

mengaplikasikannya dalam realitas kehidupan pada keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan serta dalam pergaulan masyarakat dunia atau global. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dari visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah terwujudnya pendidikan yang maju di Jawa Barat pada tahun 2018, dengan karakteristik atau ciri-ciri berorientasi jauh ke masa depan; dan peka atau tanggap terhadap setiap perubahan situasi politik, hukum, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Situasi pendidikan maju di Jawa Barat akan terwujud diakibatkan oleh dukungan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang :

- a. memiliki komitmen tinggi dengan dirinya sendiri;
- b. memiliki kesadaran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan, keimanan, kebangsaan atau nasionalisme, budaya dan kearifan lokal Jawa Barat dalam realitas kehidupan;
- c. memiliki kapasitas, kemampuan dan kecakapan serta ketrampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan setiap permasalahan dalam realitas kehidupan;
- d. mampu memberikan solusi optimal dan tuntas dari setiap permasalahan secara efisien dan efektif secara logis, rasional dan sistematis;

- e. memiliki kapasitas, keyakinan terhadap kemampuan dirinya tanpa adanya ketergantungan kepada orang/pihak lain;
- f. memiliki kemauan dan kemampuan untuk terus menerus melakukan pengembangan diri dalam riset atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. memiliki penghormatan, rasa cinta dan memiliki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal Jawa Barat sebagai landasan berfikir, pengambilan keputusan, bersikap dan bertindak dalam realitas kehidupan;
- h. memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam menerapkan sistem tatakelola (manajemen) modern; yang didukung oleh pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang mutakhir;
- i. memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan guna bersaing dan memiliki keunggulan di dalam pergaulan dan tantangan kehidupan masyarakat dunia atau global.

Program Nasional bidang Pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- 3) Program Pendidikan Menengah;
- 4) Program Pendidikan Luar Biasa;

- 5) Program Pendidikan Non Formal;
- 6) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 8) Program Pendidikan Tinggi; dan
- 9) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.

Program-Program Prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah:

- i. Peningkatan Akses dan daya saing Pendidikan Tinggi;
- ii. Peningkatan Akses dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Vokasi;
- iii. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- iv. Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Bermutu;
- v. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung antara lain:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- 3) Program Pendidikan Menengah;
- 4) Program Pendidikan Luar Biasa;
- 5) Program Pendidikan Nonformal;
- 6) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bandung

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

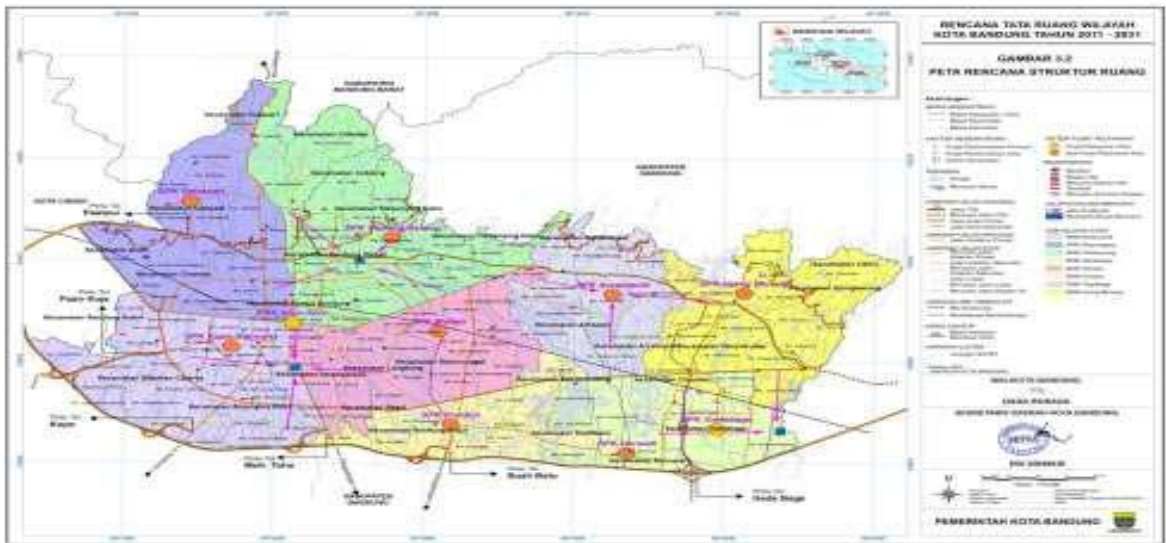
Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah

yang dilayaninya. Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutans lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

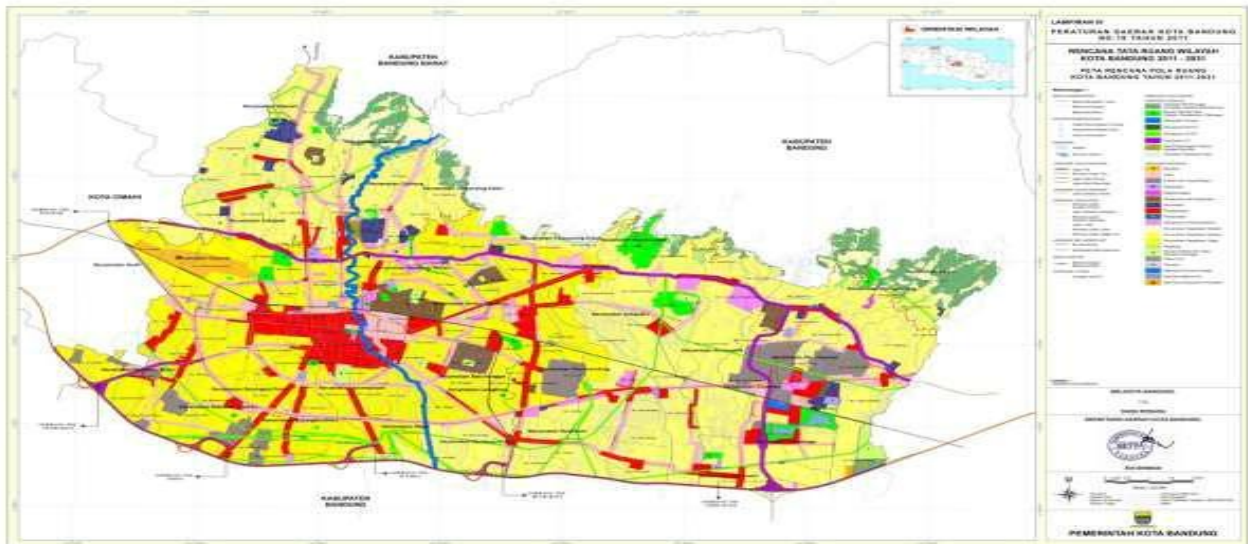
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan

- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Gambar 4.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

A. Akses:

- Tantangan di masa 5-10 tahun ke depan adalah jumlah anak usia pendidikan dasar menengah akan meningkat. Namun demikian data dan informasi anak-anak usia wajib belajar yang tidak sekolah belum terjaring dengan baik;

- Penuntasan wajib belajar 9 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
- Pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban pelayanan pendidikan tidak seimbang.
- Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

B. Peluang :

- Lokasi sarana pendidikan yang semakin dekat dengan permukiman, khususnya permukiman baru;
- Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;

C. Mutu :

- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna social yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya masing-masing daerah
- Rendahnya kepekaan terhadap warisan budaya daerah nenek moyang sebagai bagian perekat budaya nasional
- Rendahnya kompetensi tenaga pendidik yang masih di bawah standar;
- Rendahnya pemanfaatan IT;
- Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan di Kota Bandung masih perlu ditingkatkan mutunya;
- Masih ada pelayanan lembaga pendidikan yang belum sesuai dengan standar nasional;
- Kemampuan siswa Kota Bandung sebagai bagian dari siswa Indonesia dalam skala internasional masih rendah dalam hal bernalar, analisa kritis, dan kreativitas hanya mampu berpikir dalam level analisa tingkat rendah dengan cara menghafal.

D. Tata Kelola:

- Belum optimalnya tata kelola sekolah menyangkut alokasi DAK untuk ruang kelas baru, dan dana BOS;
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga pendidikan masih rendah;
- Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Nasib sekolah pinggiran yang masih minim sarana prasarana;
- Inkonsistensi dan tertutupan dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah belum sepenuhnya sesuai Permendiknas No. 19 Tahun 2007;
- Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
- Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan belum optimal;
- Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;
- Operasionalisasi sekolah mengalami permasalahan akibat tingginya jumlah siswa, termasuk yang berasal dari luar Kota

Bandung, sehingga kekurangan ruang kelas baru pada pendidikan dasar masih banyak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Pendidikan Kota Bandung telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN
VISI DAN MISI RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

	MISI (RPJMD)	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
1	Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing	Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Harapan Lama Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Harapan Lama Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP,
2	Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih, dan melayani	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat

	MISI (RPJMD)	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
3	Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Gini Rasio	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Miskin Mengikuti Pendidikan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan bantuan pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Miskin Mengikuti Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD pendidikan gratis, Persentase siswa SD miskin yang Mendapat bantuan pendidikan, Angka Putus Sekolah SMP pendidikan gratis, Persentase siswa SMP miskin yang Mendapat bantuan pendidikan, Persentase masyarakat miskin yang

	MISI (RPJMD)	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
									mendapat bantuan pendidikan, Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan, seperti yang tergambar pada table berikut:

**Tabel 4.2:
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bandung
Tahun 2018-2023**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	IKU
		Angka Kelulusan	IKU
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	IKU
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	IKU
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKU

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2018-2023, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung setiap tahunnya dalam periode 5 tahun. Data target indikator

kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3:
Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Per tahun					Target Akhir Periode Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD, Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14.00 Tahun	14.01 Tahun	14.02 Tahun	14.03 Tahun	14.04 Tahun	14.04 Tahun
			Angka Kelulusan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	76.74	76.76	76.78	76.80	76.82	76.82
			Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	57.03	57.04	57.05	57.06	57.07	57.07

				Target Per tahun					Target Akhir
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.80	83.85	83.90	83.95	84.00	84.00
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Miskin Mengikuti Pendidikan	Persentase Masyarakat yang mendapatkan bantuan pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Miskin Mengikuti Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
			Persentase siswa SD miskin yang Mendapat bantuan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Target Per tahun					Target Akhir
			Angka Putus Sekolah SMP	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
			Persentase siswa SMP miskin yang Mendapat bantuan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Masyarakat yang mendapatkan bantuan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Target Per tahun					Target Akhir
			Persentase Masyarakat yang mendapatkan bantuan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018-2023, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi daerah yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Dinas Pendidikan 2018-2023 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi daerah yang merupakan penugasan RPJMD 2018-2023, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perpres, Rancangan Inpres, Perda atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga

dituangkan dalam kerangka regulasi Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023.

Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan Kota Bandung, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Pemerintah Kota Bandung 2018-2023 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.1: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan

Visi: Terwujudnya Kota Bandung yang nyaman, unggul, sejahtera, dan agamis			
Misi I: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Mutu Infrastruktur Pendidikan Meningkatkan Mutu Proses Pembelajaran Meningkatkan	Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dalam rangka Penguatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Perluasan pendidikan inklusif SD dan SMP

		Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<p>Penuntasan buta aksara</p> <p>Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).</p> <p>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).</p> <p>Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN).</p>
--	--	---------------------------------------	--

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Melayani

Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Meningkatkan Mutu Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan	<p>Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan penggunaan sumber daya utama (<i>digital library infrastruktur</i>), <i>ICT</i>, perpustakaan sekolah, dan laboratorium).</p> <p>Pengembangan dan Pengawasan kapasitas guru</p> <p>Penguatan Program <i>Smart School/Digital Classroom</i>.</p> <p>Rehabilitasi Ruang Kelas yang rusak</p>
--	---	--	---

Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan

Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Miskin Mengikuti	Meningkatkan bantuan pendidikan bagi Siswa dan	Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan Rawan Melanjutkan Pendidikan
--	--	--	---

	Pendidikan	Masyarakat miskin	(RMP) serta Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan Warga Belajar
--	------------	----------------------	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pendidikan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018-2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kota Bandung dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bandung, yaitu Program Pelayanan Administrasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Inovasi Pendidikan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD, Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP, Program Pendidikan Nonformal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program

Pengembangan Sekolah Gratis SD, Program Pengembangan Sekolah Gratis SMP, serta Program Bantuan Pendidikan

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1:
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Bandung Prioritas Tahun 2018-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD ((tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				755,949,030,283		731,130,248,751.96		741,394,372,693.91		769,658,496,637.45		788,922,620,579.99	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,013,271,678	100%	3,881,510,793.32	100%	3,983,782,454	100%	4,086,054,115	100%	4,188,325,777	100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	3,076,686,999	100%	2,975,675,397.15	100%	3,054,079,730	100%	3,132,484,064	100%	3,210,888,397	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	168,811,600,000	100%	163,269,297,473.68	100%	167,571,184,843	100%	171,873,072,213	100%	176,174,959,582	100%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	79.54%	79.56%	5,085,328,910	79.57%	4,918,371,003.88	79.59%	5,047,962,289	79.61%	5,177,553,574	79.63%	5,307,144,860	79.63%

Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	0.22 %	0.24 %	10,801,552,561	0.27%	10,446,923,660.81	0.29%	10,722,183,551	0.31%	10,997,443,442	0.33 %	11,272,703,332	0.33 %
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	100%	100%	4,332,632,000	100%	4,190,386,104.11	100%	4,300,796,140	100%	4,411,206,177	100%	4,521,616,213	100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	102.12%	-	-	102.16%	236,906,275,576.21	102.19%	234,148,380,677.00	102.21%	249,390,485,779.00	102.23%	255,632,590,880.00	102.23%
	Angka Partisipasi Kasar SMP	103.10%	-	-	103.14%		103.16%		103.18%		103.21%		102.21%
	Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%		100%
	Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%		100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Kasar SD	102.12%	102.13%	123,151,652,785	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	103.10%	103.11%	115,949,413,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	100%	100%	2,813,813,804	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Inovasi Pendidikan	Presentasi Inovasi Pendidikan yang dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan	100%	100%	3,033,361,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		100%	100%	188,094,000	100%	181,918,631,42	100%	186,711,899	100%	191,505,167	100%	196,298,435	100%
Program Bantuan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	NA	NA		0.01%	304,359,890,111.39	0.01%	312,379,291,109	0.01%	320,398,692,107	0.01%	328,418,093,105	0.01%
	Persentase siswa SD miskin yang mendapat bantuan pendidikan	NA	NA		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%
	Angka Putus Sekolah SMP	NA	NA		0.02%	-	0.02%	-	0.02%	-	0.02%	-	0.02%
	Persentase siswa SMP miskin yang mendapat bantuan pendidikan	NA	NA		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%
	Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan	NA	NA		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	Angka Putus Sekolah SD pendidikan gratis	0.01%	0.01%	96,874,505,224	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	Angka Putus Sekolah SMP	0.02%	0.02%	217,817,116,658	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan disajikan indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Bandung.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD dari sisi keberhasilan penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran rencana strategis periode 2018-2023. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu rencana membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan. Indikator kinerja dimaksud juga perlu bagi publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1: Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.90 Tahun	14.00 Tahun	14.01 Tahun	14.02 Tahun	14.03 Tahun	14.04 Tahun	14.04 Tahun
2	Angka Kelulusan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	76.72	76.74	76.76	76.78	76.80	76.82	76.82
4	Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	57.02	57.03	57.04	57.05	57.06	57.07	57.07

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan, partisipasi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Dinas Pendidikan, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Dinas Pendidikan beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pendidikan, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai pada periode 2018-2023. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Eselon II, III, IV, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta Sekolah dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan selama lima tahun mendatang.

Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu:

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kota Bandung untuk memahami dengan baik

konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama.

2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM 90 Kota Bandung pada tahun 2023.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.
4. Optimalisasi tugas, fungsi, dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023 secara konsisten dan didukung dengan komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pendidikan dengan sebaik-baiknya, maka swasta dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan

bidang pendidikan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung yang memiliki cakupan Kota Bandung dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung pembangunan nasional akan menjadi kenyataan.

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Bandung khususnya, dan Pendidikan Nasional umumnya, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia unggul yang dapat bersaing secara global.